

#7

Registrasi Sosial Ekonomi di Indramayu: Memahami Kemiskinan dengan Kelindan Persoalan Sosial di Wilayah Agraris–Maritim

Nurul Hilmiati & Dian Karinawati Imron

A. Berlari Keluar, Lupa Kemiskinan: Pengantar

Justifikasi pemilihan Kabupaten Indramayu sebagai lokasi kajian karena persentase keluarga pra-sejahtera tertinggi kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Kuningan dengan persentase sebesar 13,04% pada tahun 2021 (BPS, 2022). Selain itu, Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang mengirim pekerja migran Indonesia terbesar di Provinsi Jawa Barat (BP2MI, 2022). Kemiskinan, PMI, kompleksitas persoalan sosial, dan potensi wilayah untuk peningkatan kesejahteraan warga merupakan aspek-aspek utama yang digali dalam kajian ini. Dengan demikian, narasi dari perspektif responden dapat memberi makna dibalik angka-angka yang tercatat dalam Regsosek. Penarasian ini diharapkan akan memberikan gambaran utuh kepada para pemangku kepentingan tentang akar permasalahan kemiskinan,

N. Hilmiati,* & D. K. Imron

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nuru053@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

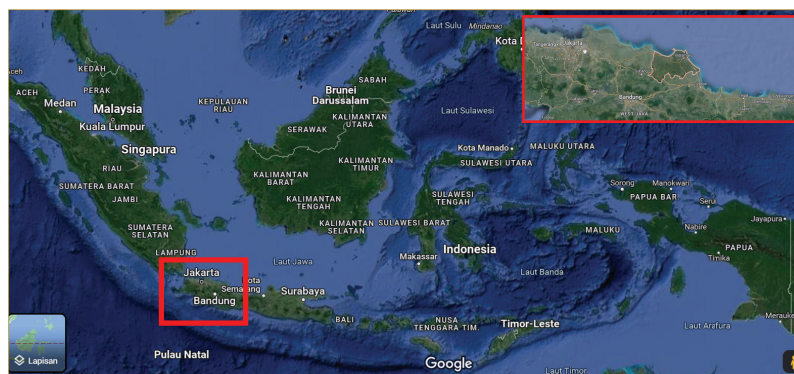
Hilmiati, N., & Imron, D. K. (2023). Registrasi sosial ekonomi di Indramayu: memahami kemiskinan dengan kelindan persoalan sosial di wilayah agraris–maritim. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (227–270). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c709 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

khususnya di Indramayu dan kaitannya dengan proses Regsosek. Pemahaman yang lebih komprehensif diharapkan akan melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat desain, tepat metode, tepat sasaran, dan tepat tujuan.

B. Bentang Alam dan Kondisi Sosial Indramayu

1. Agroekologi dan Komoditas Unggulan

Kabupaten Indramayu terletak sekitar 200 km sebelah timur ibu kota negara, Jakarta (Gambar 7.1). Dengan luas sekitar 2.000 km², kabupaten ini merupakan salah satu dari enam kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat. Wilayah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan Kota Cirebon. Wilayah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Laut Jawa dan wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 309 desa dan 8 (delapan) kelurahan.



Sumber: Google Maps (t.t.)

Gambar 7.1 Kabupaten Indramayu

Lokasi penelitian dilaksanakan pada beberapa desa di Kecamatan Juntinyuat, di antaranya Desa Juntikebon, Desa Juntikedokan, dan Desa Dadap. Mayoritas penghidupan warga desa di Indramayu ditopang oleh beberapa sektor, yaitu pertanian, perikanan, pertambangan dan jasa.

Kabupaten Indramayu memiliki sekitar 122 ribu hektare lahan sawah yang sebagian besar memiliki irigasi teknis (Gambar 7.2). Namun, pola pertanaman di Indramayu hanya dua kali dalam satu tahun yang didominasi oleh padi di musim hujan (MH) dan padi atau palawija di musim kemarau I (MK I). Indramayu terkenal dengan berasnya dan merupakan salah satu penghasil padi yang penting di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, pada musim kemarau II (MK II), sebagian besar lahan pertanian dibiarkan *berau* (kosong) karena tidak cukupnya air irigasi untuk mengairi pertanian. Sawah akan digarap kembali pada musim hujan berikutnya. Kepemilikan lahan di Indramayu berkisar antara 0.2—1.5 ha/keluarga. Namun, ada beberapa wilayah dimana lahan pertanian sebagian besar dikuasai oleh orang-orang berada di wilayah tersebut atau di luar wilayah sementara sebagian besar penduduknya hanya sebagai buruh tani.

Selain padi, Indramayu telah dikenal secara nasional sebagai wilayah penghasil mangga, seperti mangga cengkir, manalagi, harum

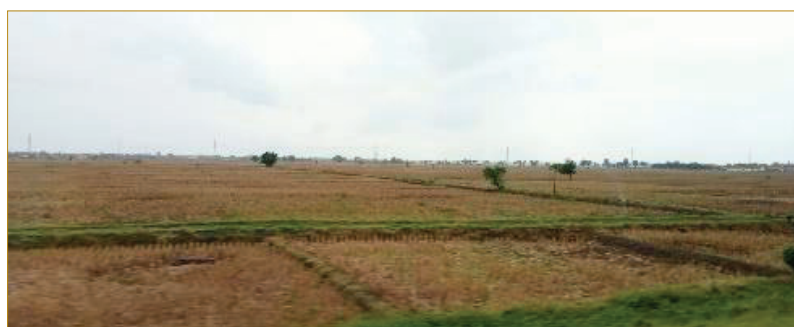


Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.2 Bentangan Lahan Pertanian di Kabupaten Indramayu

manis, dan yang paling terkenal adalah mangga gedong gincu. Jenis mangga yang terakhir ini sangat atraktif dengan warna kulit yang merah kuning merona. Mangga merupakan sumber penghasilan yang penting bagi sebagian warga. Mangga ditanam diantara pematang-pematang sawah atau khusus dibuat menjadi kebun mangga. Satu pohon mangga dapat mendatangkan penghasilan sekitar Rp300.000,00 setiap kali panen. Dengan jumlah yang melimpah, mangga belum diolah menjadi berbagai jenis produk turunan sebagai bentuk peningkatan nilai tambah produk. Mangga pada umumnya dijual dalam bentuk segar dengan target utama pasar di wilayah Jabodetabek.

Selain sektor pertanian, warga Indramayu mengandalkan hasil tangkapan laut. Salah satu desa nelayan dengan karakteristik alam yang menarik untuk dikaji ialah Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat (Gambar 7.3). Menurut seorang kepala dusun, masa produktif nelayan melaut hanya enam bulan, pada saat musim angin Timur dari bulan April–September. Musim angin Timur musim adalah musim banyak ikan besar dan kecil yang tertangkap. Kemudian, musim angin Barat (Oktober–Maret) menunjukkan hal yang berbeda yaitu nelayan sulit untuk melaut karena faktor alam (curah hujan tinggi, gelombang



Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.3 Salah satu sudut Desa Dadap, sebuah desa nelayan di Kecamatan Juntinyuat

tinggi, dan angin kencang). Nelayan menghabiskan waktunya untuk menyelam kembali jaring penangkap ikan yang robek dan memperbaiki perahu yang rusak pada masa tidak melaut. Ukuran perahu nelayan-nelayan di Desa Dadap bervariasi. Uniknya, ada warga yang menangkap ikan menggunakan perahu yang terbuat dari gabus *styrofoam* yang dirakit menjadi sampan. Menurut penuturan kepala dusun, nelayan-nelayan di Desa Dadap sudah sangat akrab dengan laut dan dengan perahu gabus tersebut dapat memperoleh penghasilan hingga Rp200.000,00 per hari.

Dengan mayoritas warga sebagai nelayan, Desa Dadap telah memiliki empat pelelangan ikan (TPI) dan koperasi yang mengelola pelelangan. Akan tetapi, patut disayangkan bahwa keberadaan TPI dan koperasi nelayan di Desa Dadap belum mampu mengangkat kesejahteraan warga karena beberapa faktor, antara lain: 1) manajemen dan pengelolaan koperasi yang tidak transparan dan didominasi oleh segelintir elit, 2) sistem penetapan harga lelang oleh koperasi yang tidak berpihak pada nelayan, dan 3) dibatasinya pembeli dari luar. Perangkat Desa Dadap sangat merasa prihatin dengan kondisi ini, tetapi di lain pihak, tidak mampu untuk berbuat banyak untuk mengubah keadaan. Pemerintah Desa Dadap beberapa kali telah melakukan upaya untuk mengakuisisi dan mereformasi koperasi nelayan, tetapi mendapatkan resistensi. Kepengurusan dan pengelolaan koperasi sangat tertutup yang dikuasai oleh beberapa elit yang juga merupakan pengusaha ikan. Kalaupun ada rapat anggota koperasi, hanya bersifat formalitas belaka.

Sistem penetapan harga lelang dan pembatasan pembeli dari luar oleh koperasi dirasakan sangat merugikan masyarakat nelayan. Menurut perangkat Desa Dadap, orang-orang yang ikut lelang hanya yang itu-itu saja sehingga harga yang ditawarkan juga cenderung menekan nelayan. Fasilitas yang belum memadai seperti *cold storage* menjadi pertimbangan bagi nelayan sehingga terpaksa menjual hasil tangkapannya daripada ikan menjadi busuk. Sebelumnya, pernah ada pembeli luar yang mencoba datang untuk ikut lelang ikan di dengan harga yang lebih bersaing. Namun, saat perjalanan pulang,

pembeli tersebut mendapatkan ancaman dan perlakuan fisik yang dirasa membahayakan dirinya. Pembeli luar enggan untuk datang ke TPI Dadap setelah kejadian. Dugaan yang muncul dari fenomena itu adalah adanya monopoli koperasi dalam penentuan harga lelang ikan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan kondisi ini, hasil tangkapan ikan yang banyak tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Sebagai contoh, satu *impling* ikan (± 13 kg) dengan kondisi normal bernilai Rp160.000,00. Namun, saat tangkapan nelayan melimpah, harga penjualan yang ditetapkan koperasi anjlok, hanya Rp40.000,00 hingga Rp50.000,00. Dengan kondisi jumlah pembeli yang itu-itu saja dan tidak ada pembeli luar yang dapat menciptakan persaingan harga, kembali lagi, nelayan terpaksa melepas ikan tangkapan daripada membusuk.

Carut marut penetapan harga lelang ikan di TPI Dadap telah merugikan nelayan. Diskusi dengan aparat desa menyebutkan bahwa seharusnya pedagang yang ikut lelang menyetorkan uang terlebih dahulu ke koperasi sejumlah barang yang akan dibelinya. Kenyataannya, sering kali para pedagang ini menyetor uang dengan jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan barang yang dibawa pergi. Salah satu warga mencontohkan bahwa pedagang A meletakkan deposit di koperasi sejumlah 10 juta rupiah untuk ikut lelang. Namun, pedagang membawa ikan nelayan senilai 20–30 juta rupiah. Menurut istilah masyarakat Dadap, banyak pedagang yang membawa pistol dengan bunyi “tarr...tarr.” Pedagang tersebut membayar ikan nelayan dengan “ucapan” saja dan ketika ditagih mulai mengeluarkan pistolnya “Taarr.... Besok,” “Taarr.... Lusa,” “Taarr... Minggu depan”. Nelayan hanya bisa pasrah.

Kabupaten Indramayu juga diuntungkan dengan pembangunan kilang minyak di Balongan yang merupakan milik PT. Pertamina, Indonesia. Kilang minyak ini mengolah minyak mentah (*crude oil*) menjadi produk-produk BBM, non-BBM, dan petrokimia. Pembangunan kilang ini tentu saja menjadi peluang lapangan kerja bagi warga sekitar. Hanya saja, menurut beberapa responden,

kebanyakan pegawai yang bekerja di kilang minyak Balongan berasal dari luar wilayah Indramayu. Warga lokal biasanya hanya mengerjakan beberapa pekerjaan level bawah sebagai penjaga keamanan, *cleaning service*, atau tenaga buruh.

2. Persoalan Pendidikan, Kemiskinan, dan Kompleksitas Sosial: Sebuah Kelindan

Posisi dan letak Kabupaten Indramayu yang berada di Pulau Jawa dan relatif tidak jauh dari ibu kota negara, Jakarta, semestinya menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu kabupaten yang maju dengan tingkat pendidikan warga yang baik. Program nasional Wajib Belajar (Wajar) sembilan tahun misalnya selayaknya dapat dipenuhi seluruh warga. Namun, realitanya tidak demikian. Menurut seorang staf BPS kabupaten, rata-rata lama pendidikan formal di Indramayu pada tahun 2021 hanya 6,1 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indramayu hanya menyelesaikan pendidikan formal selama enam tahun (SD). Menurut beliau, hal ini sudah jauh meningkat dibandingkan lima tahun sebelumnya yang hanya 5,9 tahun saja. Artinya, rata-rata penduduk Indramayu pada lima tahun lalu tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar enam tahun.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat mengikuti sekolah, meliputi kemiskinan, persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan persepsi masyarakat terhadap ukuran dan standar keberhasilan. Faktor kemiskinan merupakan faktor yang sering disebutkan oleh responden sebagai penyebab utama rendahnya tingkat pendidikan formal di Indramayu. Menurut staf BPS Kabupaten Indramayu, wilayah ini masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini cukup mencengangkan apabila dilihat dari segi kondisi agroekologi Indramayu sebagai lumbung beras dan potensi komoditas lain yang ada, seperti komoditas perkebunan dan perikanan.

Rendahnya tingkat pendidikan berkelindan dengan dua faktor lain. Pertama, persepsi masyarakat terhadap pentingnya

pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, tersirat dan tersurat bahwa banyak masyarakat Indramayu yang lebih mementingkan anaknya dapat menghasilkan uang daripada menyelesaikan pendidikan. Ada kecenderungan masyarakat bahwa lebih cepat bekerja dan menghasilkan uang, lebih baik daripada bersekolah lama-lama. Menurut seorang responden, orang tua bersedia melepas anak-anaknya yang masih berusia sekolah untuk dibawa oleh orang lain bekerja di luar Indramayu. Perempuan-perempuan muda Indramayu ditengarai turut bekerja di dunia hiburan orang dewasa.

Faktor kelindan lain akan rendahnya tingkat pendidikan di Indramayu adalah persepsi masyarakat terhadap ukuran keberhasilan dan kesuksesan individu yang berorientasi materi. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan pimpinan wilayah menyebutkan bahwa masyarakat umumnya ingin cepat kaya. Penampilan fisik sebagai refleksi dari kekayaan itu menjadi sangat penting bagi sebagian besar warga. Oleh karena itu, warga cenderung berlomba untuk memperlihatkan capaian-capaian finansialnya untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi diri. Rumah-rumah megah nan indah berjajar rapi hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun, para responden mengingatkan agar jangan terkecoh dengan tampilan fisik rumah tersebut karena warga yang ada di dalam rumah tersebut belum tentu sejahtera. Rumah-rumah mewah kebanyakan dibangun dari hasil sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Para warga bekerja keras agar dapat membangun rumah yang minimal sama bagusnya dengan milik tetangga. Hal itu lebih karena pada faktor “gengsi”. Ungkapan kata ini terdengar dari sebagian besar responden. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya gengsi pada hal-hal kepemilikan yang bersifat materi telah berurat berakar di kalangan masyarakat Indramayu. Ungkapan masyarakat yang sering terdengar ialah warga rela makan susah selama memiliki rumah bagus. Warga desa mencoba untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dalam waktu secepatnya.

Selain budaya gengsi, ada hobi berbiaya tinggi yang sangat lazim di kalangan masyarakat Indramayu, yang pada gilirannya



Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.4 Rumah-rumah di Kecamatan Juntinyuat

berkontribusi pada kondisi kemiskinan. Hobi tersebut adalah *nyawer* pada acara hiburan yang biasanya terbuka untuk umum. *Nyawer* telah menjelma menjadi ajang untuk mendapatkan pengakuan akan eksistensi dan keberadaan sosial seorang laki-laki. Menurut seorang responden, banyak para laki-laki yang banting tulang bekerja baik di darat maupun laut, tetapi merelakan begitu saja uang ratusan hingga jutaan rupiah untuk *nyawer*. Kebanggaan para penyawer ini adalah saat ia memberikan uang kepada biduanita lalu sang biduanita menyorongkan mikrofon agar sang penyawer dapat menyebut namanya dengan lantang dan bisa didengar oleh khalayak ramai. Seperti contoh, “Fulan..... Seratus ribu,” “Fulan.... Dua ratus ribu.” Sang biduan pun akan memancing agar para penyawer saling berlomba memberikan sawer yang lebih besar. Tanpa disadari, uang hasil kerja keras tersebut lenyap dalam sekejap demi kesenangan dan kebanggaan untuk disebut nama. Sang penyawer kembali tidak punya uang saat pulang dan kemiskinan pun kembali melilitnya.

3. Pekerja Migran dan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Kondisi kemiskinan ekstrem dan pengaruh tuntutan sosial telah membuat sebagian warga Indramayu memilih menjadi pekerja migran. Daerah ini merupakan pengirim tenaga migran terbanyak se-Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2022), pada tahun 2021 setidaknya 5.262 tenaga kerja dari Indramayu mendapatkan penempatan kerja di luar negeri. Jumlah total tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri pada

tahun yang sama sejumlah 72.642 orang. Sementara itu, data pada tahun 2019 (sebelum Covid-19) memperlihatkan 23.360 orang dari Indramayu diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri (BNP2TKI, 2019). Menurut salah seorang kepala dusun, desa nelayan ini dipadati oleh 6.000 keluarga dan 2.000 diantaranya sedang bekerja di luar negeri. Pada 10 tahun yang lalu, pekerja migran ini didominasi oleh kaum hawa dengan tujuan utama wilayah Timur Tengah. Namun, beberapa tahun terakhir, PMI ini pun mulai sangat diminati oleh kaum adam. Hal ini seiring dengan terbukanya tujuan-tujuan baru yang menggeser dominasi wilayah Timur Tengah, seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Hongkong. Pendapatan bulanan yang berkisar delapan hingga sepuluh juta rupiah per bulan, telah memikat banyak warga Indramayu untuk merantau menjadi pekerja migran. Pekerjaan sebagai pekerja migran telah menjadi sangat populer dan dianggap sebagai jembatan emas yang akan mengantarkan orang memenuhi kebutuhan finansial sekaligus mengangkat derajat dan status sosial dengan kepemilikan benda-benda material.

Namun, ada satu pertanyaan mendasar dengan fenomena pekerja migran ini. Apabila pekerjaan ini menghasilkan cukup materi dan telah berlangsung selama puluhan tahun, mengapa Indramayu masih berada dalam kemiskinan ekstrim? Sesuatu yang sepintas tampak saling bertolak belakang. Seorang PML yang memiliki pengalaman sebagai pekerja migran menuturkan bahwa umumnya orang yang menjadi pekerja migran akan selalu ingin kembali lagi bekerja di luar negeri. Situasi ini tidak mengherankan apabila setelah pulang dari luar negeri, pendapatan pekerja migran tidak bertahan lama. Selama bekerja di luar negeri, pekerja migran juga mengirim untuk biaya hidup keluarga sehari-hari. PMI juga mengirim biaya hidup terlebih apabila PMI menitipkan anak kepada keluarga. Penyebab lain hasil kerja PMI tidak bertahan lama adalah gaya hidup yang berubah. PMI menerangkan bahwa setelah pulang bekerja dari luar negeri, ada tuntutan sosial di masyarakat. PMI yang baru pulang bekerja harus memiliki penampilan dan gaya hidup yang berbeda dari saat sebelum berangkat. Beberapa tuntutan sosial tersebut seperti rumah

harus lebih bagus, penampilan, dan kendaraan baru, serta berbagai gaya hidup yang berorientasi materi. Pekerja migran menghabiskan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang ketika kembali ke kampung dan setelah kembali sering kali bingung harus bekerja apa.

Fenomena pekerja migran ternyata telah berdampak pada berbagai kondisi sosial yang pelik bagi masyarakat Indramayu. Dampak terbesar yang dialami pekerjaan migran adalah kehidupan rumah tangga. Seorang tokoh masyarakat di Desa Dadap mengungkapkan, “Hasil bekerja sebagai PMI tidak sebanding dengan dampak pada kehidupan.” Ada nada dan roman muka sangat pedih sekaligus geram ketika beliau menyampaikan hal tersebut. Hal senada juga didapatkan dari responden lain. Tak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan PMI memiliki andil dibalik tingginya angka kawin-cerai di Indramayu. Saling berjauhan kemudian berada di negeri dengan norma pergaulan yang bebas telah menjadikan pasangan suami-istri rentan untuk saling meninggalkan. Perempuan pekerja migran pun tidak sedikit yang mengirim hasil kerjanya kepada suaminya dikampung, tetapi digunakan untuk berfoya-foya, seperti main judi, perempuan, dan mabuk. Pasangan pun ada yang berpisah karena kejadian tersebut. Kejadian lain, laki-laki pekerja migran memilih menikah dengan perempuan lain selama berada di luar negeri dan istrinya akhirnya memilih menikah lagi di kampung dengan laki-laki lain. Kemudian, wanita pekerja migran ada yang pulang membawa “oleh-oleh” dalam istilah masyarakat berupa anak dari lelaki asing negara tempat wanita tersebut bekerja. Anak-anak ini juga menghadapi tantangan terkait pendataan akta kelahiran dan mengikuti jenjang pendidikan formal.

Dampak tidak kalah menyedihkan dari pekerjaan PMI ini adalah pada pengasuhan anak. Sering kali, para PMI meninggalkan anak-anak yang masih berusia balita dan dititipkan pada nenek atau keluarga dekatnya. Perhatian dan kasih sayang yang didapatkan untuk anak tumbuh dan berkembang tentu saja tidak akan pernah sama dengan orang tua kandungnya. Dampak keadaan ini terlihat pada pemenuhan gizi dan sekolah anak. Sering kali, sang nenek kurang memahami kebutuhan gizi sang anak. Anak diberikan

makanan seadanya sehingga banyak kasus anak-anak *stunting* yang justru tinggal di dalam rumah-rumah dengan kondisi layak. Masalah lain yang juga sering timbul ialah perhatian yang diberikan lebih pada untuk memenuhi permintaan anak yang berupa benda-benda material seperti ponsel atau sepeda motor.

Persoalan demi persoalan yang ada seolah seperti lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkalnya. Satu sama lain berkelindan dalam sengkabut yang sangat kompleks menyangkut aspek pendidikan, ekonomi, nilai-nilai agama, dan norma-norma sosial. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan kesungguhan, keikhlasan, dan keberanian para pemegang kepentingan. Penyelesaian berbagai permasalahan juga memerlukan waktu yang tidak pendek, bahkan mungkin memerlukan perubahan lintas generasi. Sungguh, sebuah ironi di wilayah lumbung pangan dengan hasil alam yang melimpah.

C. Menelisik Awal Pemahaman Proses Bisnis Registrasi

1. Proses Regsosek

Regsosek yang dilaksanakan dari akhir bulan Oktober–November 2022 telah melalui sejumlah rangkaian persiapan. Menurut seorang staf BPS Pusat, perbincangan awal pada level pimpinan dimulai pada bulan Juni 2022 ketika Bappenas mengundang kementerian terkait untuk merancang sebuah survei yang bertujuan untuk memutakhirkan data kondisi sosial ekonomi seluruh warga Indonesia. Dengan segala dinamika yang berkembang, termasuk ketidakpastian anggaran hingga bulan Agustus 2022, akhirnya para pihak kemudian menyepakati rancangan model dan pelaksanaan Regsosek yang berlangsung selama sebulan penuh dari tanggal 24 Oktober hingga 24 November 2022. Hal ini tidak terlepas dari dukungan lintas kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri yang menyetujui untuk menggerakkan organisasi kecamatan dan desa untuk mendukung sosialisasi dan pelaksanaan Regsosek. Dukungan penuh datang dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan menyediakan perangkat informasi

teknologi dan *platform* penyimpanan *big data* Regsosek. Pimpinan TNI/POLRI pun tak ketinggalan memberikan dukungan dengan membuka akses untuk melakukan pendataan ke seluruh satuan-satuan tugas tentara/polisi.

Persiapan pelaksanaan Regsosek tergolong singkat. Hanya ada waktu empat bulan untuk segala persiapan dan apabila dibandingkan dengan sensus lain seperti Sensus Pertanian yang memiliki waktu persiapan dua tahun sebelum pelaksanaan. Ada beberapa tahapan pelaksanaan Regsosek di tingkat lapangan antara lain: 1) penyiapan bahan seperti kuesioner serta sarana prasarana pendukung; 2) koordinasi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten dengan para pihak terkait; 3) rekrutmen petugas pelaksana; 4) pelatihan petugas; 5) pelaksanaan sensus; 6) pengelolaan data dan berkas hasil sensus; 7) *entry* data dan analisis; dan 8) forum komunikasi publik.

Kepala BPS dan Ketua Tim Pendataan Lapang Regsosek Kabupaten Indramayu mengungkapkan dalam sensus regular yang lain, semua perlengkapan dan sarana pendukung seperti kuesioner, perlengkapan lapangan, dan bahan pendukung lainnya disiapkan oleh BPS Pusat. BPS Kabupaten hanya sebagai pelaksana kegiatan. Namun, dalam Regsosek ini, seluruh pengadaan dan diserahkan kepada BPS Kabupaten. Hal ini dibenarkan oleh seorang staf dari BPS Pusat. Strategi ini dilakukan mengingat sempitnya jeda waktu persiapan sehingga bila menggunakan sistem terpusat, dikhawatirkan bila terjadi kegagalan atau tidak berjalan sesuai harapan, maka Regsosek terancam gagal total. Namun, dengan sistem terdistribusi ini, kemungkinan tersebut diperkecil. Apabila terjadi kegagalan pada satu kabupaten, tidak akan memengaruhi kabupaten yang lain dan apabila ada satu kabupaten yang gagal, masih ada banyak kabupaten yang dapat melaksanakan Regsosek.

Hasil wawancara di BPS Kabupaten Indramayu menunjukkan adanya beberapa tantangan pada tahap persiapan, yaitu koordinasi para pihak dan pelatihan petugas pendataan. Tantangan terbesar bagi BPS kabupaten dalam persiapan adalah pengadaan kuesioner dan bahan pendukung lainnya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah

rekanan di daerah dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Selain itu, juga proses administrasi keuangan dengan volume yang besar membutuhkan kerja ekstra dari semua staf BPS yang hanya berjumlah 35 orang termasuk pimpinan. Namun, dengan pendampingan dari BPS Provinsi Jawa Barat, tahapan pengadaan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sementara itu, koordinasi dengan pihak bupati untuk dukungan pelaksanaan juga mengalami tantangan. Surat edaran bupati kepada seluruh OPD sangat diharapkan terbit segera untuk mendukung pelaksanaan Regsosek. Selain itu, bupati juga diharapkan muncul dalam tayangan-tayangan di media promosi Regsosek. Namun, faktanya sosialisasi Regsosek dengan gambar pimpinan daerah tidak dapat ditayangkan. Tantangan lain untuk tahapan persiapan Regsosek di Kabupaten Indramayu adalah pada pelatihan petugas. Menurut ketua tim pendataan lapang, kegiatan Regsosek ini melibatkan petugas dengan total jumlah 3.152 personil yang terdiri dari 27 orang organik BPS, 614 orang Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), 2449 orang Petugas Pendataan Lapangan (PPL), dan 62 orang Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Seluruh petugas, tentu perlu mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum terjun melaksanakan Regsosek. Sementara itu, pelatihan petugas didesain untuk waktu dua hari. Hal ini berarti peserta pelatihan harus diinapkan demi efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan. Di sisi lain, Kota Indramayu tidak memiliki fasilitas hotel dengan aula pertemuan yang dapat menampung banyak peserta. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pelatihan dilaksanakan di Kota Cirebon dengan daya tampung hotel besar dan fasilitas pendukung pelatihan yang lebih baik.

Namun, pelatihan pembekalan petugas Regsosek yang dilaksanakan di Kota Cirebon memunculkan tantangan lain. Beberapa daerah sekitar dengan kondisi yang sama juga memiliki pemikiran untuk menggunakan hotel yang sama, seperti dari Kabupaten Majalengka, Kuningan dan Kota Cirebon sendiri. Akibatnya, terjadi rebutan hari pelaksanaan dan harus dilaksanakan secara bergelombang. Pelatihan akhirnya dilaksanakan sebanyak 16 gelombang di mana

masing-masing gelombang terdiri dari 4—5 kelas dan setiap kelas berisi sekitar 40 petugas. Dengan terbatasnya instruktur pelatihan dari kantor BPS, gelombang pelatihan ini menimbulkan tekanan beban kerja bagi para instruktur. Namun, dengan semangat dan kerja keras semua pihak, pelatihan ini akhirnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Materi pelatihan menurut PML dan PPL yang diwawancarai terdiri dari dua bagian. Materi pertama adalah pengenalan alat sensus berupa kuesioner, pemahaman arti dari istilah-istilah yang digunakan, dan pemahaman maksud dari pertanyaan. Materi kedua meliputi teknik-teknik wawancara dan strategi untuk mendapatkan serta informasi yang akurat. PML dan PPL responden menyampaikan bahwa pelatihan yang didapatkan sudah cukup sebagai bekal untuk melaksanakan sensus Regsosek. Namun, dalam pelaksanaan pendataan, sering kali PPL kembali lagi ke PML untuk menanyakan beberapa hal yang dianggap kurang jelas.

Tahapan selanjutnya dari proses Regsosek adalah rekrutmen petugas pelaksana. Menurut Kepala BPS dan Ketua Tim Pendataan Lapang Regsosek Kabupaten Indramayu, rekrutmen dilakukan dengan sistem terbuka dengan memasang pengumuman melalui media sosial, seperti Facebook dan grup Whatsapps. Rekrutmen memang dilakukan melalui sistem terbuka, tetapi berdasarkan wawancara dengan beberapa PML mengindikasikan bahwa PML-PML yang telah lama menjadi mitra BPS mengidentifikasi individu di sekitar wilayahnya yang kira-kira dianggap mampu, cakap, dan bertanggung jawab untuk menjadi PPL. Individu-individu ini kemudian disarankan untuk mendaftar melalui rekrutmen terbuka. PML-PML yang sudah lama menjadi mitra BPS ini juga memberikan rekomendasi dan catatan pada tahap seleksi petugas pencatat lapangan. Tenaga PPL yang direkrut ini umumnya berasal dari wilayah desa setempat dengan pertimbangan lebih mengenal medan dan masyarakat yang akan didata. Namun, ada juga yang bertugas lintas desa, tetapi tidak sampai melewati batas kecamatan.

Berdasarkan struktur pelaksanaan Regsosek, koordinator kecamatan dapat berasal dari organik staf BPS kabupaten. Namun,

kondisi staf tidak mencukupi maka direkrut mitra BPS. Umumnya, mitra yang ditunjuk sebagai Koseka adalah orang-orang yang telah berpengalaman lama mengikuti kegiatan sensus-sensus BPS dan telah memahami pola kerja serta manajemen pelaksanaan sensus. Adapun pembagian wilayah kerja bagi PPL berdasarkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang dapat berupa RT atau pembagian khusus seperti Nagari yang ada di Sumatra Barat. Satu desa dapat terdiri dari tiga hingga empat PML. Kemudian, di antara PML di desa menyepakati wilayah kerja serta PPL yang berada di bawahnya. Salah satu kasus PML yang dijumpai di Desa Juntikedokan ialah PML tersebut memilih wilayah kerja dan PPL di luar kampungnya dengan alasan bahwa bekerja di wilayah kampung sendiri akan kurang dihargai. PML tersebut memilih bekerja di wilayah kampung sebelahnya.

Secara struktur, PPL bertanggung jawab kepada PML. Apabila ada kendala baik dalam memahami kuesioner maupun teknis pelaksanaan sensus, PPL akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PML. Apabila PML mengalami kebingungan dan kendala, akan berkoordinasi dengan Koseka. Setelah PPL melaksanakan survei pada hari tersebut, maka berkas-berkas diserahkan ke PML untuk diperiksa akurasi serta validitas data. Data yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada PPL untuk di *cross check* kembali di lapangan. Sebagaimana yang peneliti saksikan di Desa Junti Kedokan, masih ada berkas kuesioner tidak lengkap isian kolomnya. PML saat itu langsung meminta PPL untuk datang ke rumahnya memperbaiki kuesioner. Kemudian, ada kasus lainnya yaitu PML kebingungan dengan salah seorang responden yang tidak diketahui pasti keberadaannya dan tidak menetap. PML tersebut menanyakan kepada Koseka bagaimana menghadapi kondisi demikian.

Komunikasi dan koordinasi setiap level pelaksana berjalan dengan baik. Salah satu media komunikasi yang digunakan dan dianggap penting untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi adalah media Whatsapps, terutama untuk saling mengingatkan instruksi dan hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan. Seorang PML di Juntikebon mengakui bila dalam Regsosek ini dia memiliki banyak sekali grup



Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.5 PML dan PPL berdiskusi terkait pendataan

Whatsapps, antara lain grup PML dengan Koseka, grup PML dan PPL, dan grup satu desa untuk memastikan tidak ada informasi dan instruksi yang terlewatkan. Beberapa kali perubahan instruksi di tengah jalan, seperti keharusan mengambil gambar kamar mandi bagi rumah tangga miskin, cukup menantang bagi PML untuk menjelaskan kepada PPL. Hal ini karena instruksi baru berarti PPL harus kembali lagi ke tempat semula melakukan pendataan dan seperti bekerja dua



Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.6 Pengumpulan Berkas Registrasi oleh Para PML

kali. Di sisi lain, PPL dituntut untuk menyelesaikan tugas dengan seksama dan secepatnya. Namun, dengan komunikasi dan pendekatan yang baik, hambatan-hambatan ini berhasil diatasi oleh para PML dan Koseka.

Tahap selanjutnya dari berkas kuesioner registrasi adalah pengumpulan. Setelah PPL mengumpulkan kuesioner ke PML, berkas-berkas tersebut kemudian diperiksa satu-persatu dan disusun per satuan lingkungan setempat (SLS) dan per desa. Berkas biasanya dibawa ke kantor BPS kabupaten oleh Koseka saat turun lapangan melakukan pendampingan kepada para PML. Berkas-berkas dari seluruh kecamatan ini kemudian disimpan dalam gudang penyimpanan. Menurut salah seorang responden karena kondisi Gedung BPS Indramayu yang tidak memiliki ruang yang cukup untuk penyimpanan berkas dari seluruh wilayah kabupaten, BPS telah menyewa sebuah bangunan khusus digunakan sebagai gudang penyimpanan berkas Regsosek.

Tahap berikutnya setelah penyimpanan berkas kuesioner adalah tahap *entry* data. Menurut ketua bidang IT BPS Indramayu, *entry* data akan dilaksanakan mulai bulan Januari–Maret tahun 2023. BPS Kabupaten Indramayu saat ini sedang melakukan proses rekrutmen tenaga-tenaga untuk *entry* data. Proses rekrutmen ini juga dilakukan secara terbuka dan diutamakan pada tenaga muda yang baru lulus

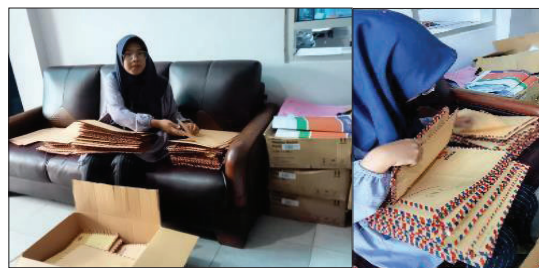


Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.7 Petugas BPS kabupaten melakukan seleksi administrasi untuk tenaga *entry* data



Foto: Nurul (2022)

Gambar 7.8 Seleksi Petugas *Entry* Data untuk Kecepatan dan Ketepatan Mengetik dan Spesifikasi Laptop

kuliah atau maksimal berusia 35 tahun. Ada sekitar ± 400 pelamar dan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sekitar ± 200 pelamar. Adapun proses seleksi berikutnya adalah seleksi spesifikasi laptop karena pelamar diharapkan memiliki laptop sendiri, seleksi kecepatan dan ketepatan *entry* data, dan kesanggupan mentaati syarat dan ketentuan yang berlaku bila diterima sebagai tenaga *entry* data.

Bagian terakhir dari proses Regsosek setelah *entry* dan analisis data adalah forum konsultasi publik (FKP) yang akan dilaksanakan di masing-masing desa. Menurut salah seorang Koseka, pada tahapan ini, BPS akan memaparkan hasil Regsosek kepada para pemangku kepentingan di desa untuk validasi hasil. Tahapan ini akan menjadi sangat penting karena menjadi kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memperbaiki data jika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan yang ada.

2. Kepentingan Daerah terhadap Data Regsosek

Regsosek dari perspektif penelitian ini memiliki nilai dan kegunaan yang sangat penting dan strategis sebagai landasan penyusunan berbagai macam program pembangunan, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah. Camat Juntinyuat menekankan pentingnya hasil data Regsosek agar program-program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran. Pimpinan

kecamatan ini juga menyampaikan harapan agar hasil Regsosek disampaikan kepada pihak kecamatan. Selama ini, sang camat menyampaikan hasil-hasil pendataan di wilayahnya sering kali tidak dikembalikan kepada pemerintah wilayah setempat sebagai acuan dalam penyusunan program.

Selain pihak kecamatan, pihak pemerintah desa pun sangat mengapresiasi kegiatan Regsosek, seperti yang diungkap oleh Pak Kuwu, Desa Dadap. Data yang dikumpulkan akan sangat penting untuk memberikan gambaran kondisi wilayah dan sektor-sektor mana yang perlu untuk diperhatikan. Kepala desa jebolan UIN Bandung ini mengungkapkan bahwa saat pertama Desa Dadap terbentuk di tahun 2018, desa ini tergolong sebagai desa tertinggal karena di sistem pencatatan nasional tercatat hanya ada 250 jiwa penghuni, padahal dalam kenyataannya ada ribuan jiwa warga. Selain itu, data-data profil desa juga sangat kurang. Sang Kuwu kemudian secara mandiri memperbarui data-data profil desa yang diperlukan dan akhirnya berhasil membawa Desa Dadap menjadi Desa Mandiri hanya dalam satu tahun. Berangkat dari pengalaman itu, Pak Kuwu sangat mengapresiasi kegiatan Regsosek karena data yang dikumpulkan sangat penting. Hanya saja, Pak Kuwu mengharapkan agar data Regsosek yang menyangkut Desa Dadap dapat dibagikan BPS ke pemerintah. Namun, kembali pada peraturan perundangan yang berlaku, bahwa BPS tidak boleh mengeluarkan data individu, tampaknya harapan pihak Kecamatan Juntinyuat dan Desa Dadap akan mengalami kendala.

E. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

1. Perspektif Pelaksana terhadap Regsosek dan Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Indramayu relatif berjalan dengan baik, lancar, dan tidak mengalami kendala yang berarti.

Hal ini terindikasi dengan tingginya capaian hasil sebelum tenggat waktu penyelesaian Regsosek. Lancarnya pelaksanaan Regsosek di Indramayu tidak terlepas dari sistem pemantauan yang dilakukan oleh BPS setempat. Ketua tim pendataan lapang menyampaikan bahwa ia memonitorprogres harian dengan melihat *dashboard* pantauan data Regsosek dari aplikasi yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dari hasil pantauan selanjutnya dilakukan evaluasi per hari. Jika ditemukan ada anomali, Koseka diminta untuk segera turun memastikan kondisi lapangan. Apabila Koseka tidak dapat menyelesaikan masalah, ketua tim pendataan lapang sendiri yang akan turun langsung. Selain strategi memonitor *dashboard*, ketua tim pendataan lapang ini meminta petugas untuk segera mengunggah data karena ada potensi hilang jika tidak dilakukan segera. Apabila data sudah diunggah, data tersebut akan tersimpan dengan aman.

2. Pandangan Masyarakat terhadap Pendataan

Banyaknya bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera selalu diawali dengan pendataan yang menimbulkan stigma pro-kontra di masyarakat, termasuk Regsosek. PML dan PPL menyampaikan hal senada bahwa pada umumnya masyarakat mengidentikkan pendataan dengan turunnya bantuan. PPL pun mengalami peristiwa langsung. Warga secara terang-terangan bertanya, “Kapan bantuannya datang?” Beberapa warga juga sempat melampiaskan kekecewaan kepada PPL karena sudah didata berkali-kali, tetapi bantuan yang diharapkan tidak juga kunjung datang. Sementara, bagi warga yang pernah mendapatkan bantuan, warga antusias dengan pendataan dan berharap namanya akan terus berada pada daftar penerima bantuan.

Adanya stigma tersebut membuat sebagian warga menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Tujuannya agar masuk dalam daftar penerima bantuan. Beberapa PPL menuturkan banyak warga yang tidak mau mengakui kepemilikan aset emas dan tanahnya. Warga diketahui ada yang memasukkan TV-nya ke dalam kardus dan menyembunyikan motornya. Namun, PPL juga tidak mau kehilangan

akal. Untuk aset emas, petugas tidak menanyakan langsung, tetapi memperhatikan penampilan istri dan anak perempuannya. Untuk kepemilikan TV, PPL biasanya memperhatikan antena yang tampak, sedangkan untuk kepemilikan aset lahan, PPL menggunakan pendekatan ketersediaan pupuk bersubsidi. Jika warga tidak terang dengan luas lahan yang dimiliki, nanti saat penebusan pupuk bersubsidi warga tidak akan mendapatkan jatah. Cara ini dipandang efektif untuk mendata kepemilikan aset.

3. Harapan Masyarakat atas Pendataan

Berbagai harapan besar masyarakat disandarkan pada pendataan Regsosek ini. Menurut PPL dan PML yang diwawancarai, sebagian besar masyarakat mengharapkan untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Warga yang sudah mendapatkan bantuan tunai dalam berbagai skema mengharapkan akan terus mendapatkan bantuan sementara yang belum mendapatkan berharap agar datanya bisa masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah. Bahkan menurut PPL, ketika petugas turun untuk mendata, sebelum PPL mulai bertanya, responden sudah terlebih dahulu bertanya, “*Ndi bantuan ne?*” ‘Mana bantuannya?’. Oleh karena itu, PPL harus menjelaskan kembali maksud dan tujuan Regsosek.

Warga juga mengungkapkan harapan terkait Regsosek agar program-program kesejahteraan dari pemerintah dapat tepat sasaran. Rumah tangga yang diwawancarai mengungkapkan sering kali program bantuan hanya menasar keluarga yang itu-itu saja karena faktor kedekatan dengan perangkat desa/dusun yang mendata warga. Beberapa wilayah kemudian mengambil kebijakan untuk memasang stiker atau cat permanen di rumah-rumah yang menerima bantuan untuk memberikan efek kontrol sosial. Warga yang merasa mampu, tetapi menerima bantuan kemudian dengan sukarela mengembalikan kartu bantuannya agar rumahnya tidak diberikan tanda sebagai warga pra-sejahtera.

F. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan

Kelembagaan sosial hari ini tetap otentik diantara berbagai perubahan dan disrupsi global. Kelembagaan sosial menggambarkan tata perilaku interaksi masyarakat dalam bangunan norma dan ikatan sosial. Elemen penting dari kelembagaan sosial ialah himpunan norma-norma kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya (Soekanto, 1990). Kelembagaan memengaruhi bagaimana kehidupan sosial diatur dan memfasilitasi fungsi sistem sosial (Messner dkk., 2013). Karakter kelembagaan sosial perdesaan membawa nilai-nilai lokal telah berperan sebagai pedoman perilaku dan menjaga keutuhan masyarakat. Ada pula mekanisme kontrol dan mekanisme mencapai tujuan bersama yang didorong oleh berbagai bentuk kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial di wilayah perdesaan menjadi salah satu wujud kelembagaan yang dapat berperan dalam mendukung kegiatan pendataan.

Dukungan kelembagaan sosial dalam Regsosek pada desa-desa di Indramayu dilakukan secara formal dan informal. Sejalan dengan pandangan Guerrero & Urbano (2020), kelembagaan meliputi kelembagaan formal (kebijakan dan peraturan) dan informal (nilai, norma, dan tingkah laku). Secara formal, kepala desa dan ketua rukun tetangga (RT) terlibat dalam proses sosialisasi Regsosek kepada masyarakat. Surat pemberitahuan dari pemerintah daerah juga disiapkan untuk mendukung kelancaran koordinasi antarpemangku kepentingan, baik pemerintah kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan organisasi masyarakat yang ada di desa. Walaupun, surat tersebut dipandang akan sangat membantu apabila disebarakan lebih awal. Dukungan kelembagaan sosial terlihat dari adanya inisiatif sebagian kepala desa dan RT untuk melakukan pertemuan reguler selama proses Regsosek sebagai bentuk pemantauan pelaksanaan. Beberapa pemerintah desa melakukan apel siaga untuk *stand by* membantu proses Regsosek. Beberapa kepala desa dan ketua RT pun ada yang merespons biasa kegiatan Regsosek ini dan memilih tidak terlalu terlibat. Pelibatan ketua RT dalam proses Regsosek dipandang

sebagai salah satu mekanisme yang membantu PML dan PPL dalam memberikan informasi dasar terkait kondisi kehidupan warga. Di sisi lain, keterlibatan ketua RT turut menjaga apabila terjadi konflik ataupun jika ada penolakan warga.

Sejauh ini, dukungan kepala desa, ketua RT, dan kelompok masyarakat terkhusus di Desa Dadap, Desa Juntikebon, Desa Juntiweden, dan Desa Juntikedokan telah membantu proses identifikasi data awal warga dan menjadi penghubung antara PML, PPL dengan warga. Namun, bukan tanpa tantangan bahwa masih ada ketua RT yang kesulitan dalam menentukan kategori sejahtera atau pra-sejahtera warganya. Untuk situasi di Indramayu, jika menggunakan kategori kemiskinan berdasarkan kondisi rumah, maka akan ditemui banyak rumah-rumah dengan kondisi layak bahkan megah. Namun, apabila dilihat lebih dalam, keluarga pemilik rumah merupakan pekerja dengan penghasilan tidak menentu, menganggur, bahkan juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa contoh ialah fenomena PMI yang mampu membangun rumah dengan kualitas baik ataupun nelayan yang memiliki berbagai barang elektronik dengan harga tinggi. Ketua RT merasa khawatir apabila menyebutkan sebagian warga masuk dalam kategori sejahtera, maka akan kecil kemungkinan menjadi sasaran penerima bantuan atau program pemerintah lainnya. Protes warga menjadi salah satu pertimbangan dan apabila masyarakat merasa pemberian bantuan tidak merata, ketua RT dan pemerintah desa akan mendapat pertanyaan warga.

Dukungan kelembagaan sosial selain dari pemerintah juga tampak dari masyarakat di beberapa lokasi. Kesamaan yang ada memunculkan ciri serupa yaitu dimana PML/PPL yang merupakan tokoh penggerak di wilayah tersebut, maka dukungan masyarakat terhadap pendataan akan terlihat. Bentuk dukungan masyarakat dapat diamati dari penerimaan dan keterbukaan masyarakat terhadap PPL, sikap kooperatif dalam pengisian data, dan menyebarkan informasi kepada warga lainnya terkait proses pendataan. PML dan PPL menceritakan bagaimana masyarakat yang ditemui menyebarkan

informasi kepada teman-temannya dan bagaimana masyarakat menerima PPL dan mendukung PPL dalam melaksanakan tugasnya di wilayah yang ditetapkan.

1. Mekanisme Komunikasi

Salah satu desa terpadat di Kecamatan Juntinyuat adalah Desa Dadap dengan jumlah ± 6.000 KK dan ± 17.000 warga. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, PML dan PPL dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendataan. Kepala desa dan ketua RT melakukan sosialisasi pada pertemuan warga dan pertemuan RT serta pertemuan informal seperti saat kegiatan kebudayaan ataupun keagamaan. Desa juga ada yang melakukan inisiasi dengan mengundang PML untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan Regsosek. Komunikasi awal yang terbangun dan terus dijaga ialah antara PML dan PPL dengan ketua RT. Sebelum PPL melakukan pendataan *door to door*, ketua RT terlibat dalam identifikasi awal situasi sosial ekonomi warga dan saat terjadi penolakan warga ataupun ada warga yang tidak dapat ditemui, maka PPL akan meminta bantuan PML dan ketua RT. Mekanisme komunikasi yang terbangun antara pemerintah desa dan ketua RT dengan PML dan PPL berlangsung dengan fleksibel, dimana kepala desa dan ketua RT dapat berkomunikasi dengan PML dan PPL secara langsung baik pertemuan maupun telepon dan pesan, bahkan jika diperlukan dapat menghubungi Koseka. Hanya saja pada praktiknya, ketua RT yang memiliki frekuensi tinggi untuk berkomunikasi dengan PML dan PPL.

Komunikasi dibangun melalui pertemuan langsung dan dengan menggunakan platform digital. *Flyer* cetak atau brosur belum terlihat di desa sehingga informasi mengenai pendataan Regsosek memang belum dapat menjangkau warga. Forum perkumpulan warga sebenarnya menjadi salah satu sasaran untuk perluasan informasi Regsosek. Kemudian, perlu juga mempertimbangkan pusat-pusat perkumpulan warga seperti sekolah, pasar, dan tempat pelelangan ikan (TPI), serta kegiatan kesenian/kebudayaan yang dilakukan di

lokasi dekat dengan pemukiman warga sebagai tujuan sosialisasi, baik lisan, melalui percakapan, maupun tulisan (*flyer*). Cara ini dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait tujuan pendataan, akan meminimalisir kekhawatiran warga terkait informasi aset dan pekerjaannya sekaligus simpang siur pemanfaatan data.

2. Sistem Pengawasan Validasi dan Pengendalian Data

Kelembagaan sosial masyarakat turut berperan dalam menjaga objektivitas informasi dan membangun mekanisme kontrol, terkhusus apabila ada bias dan ketidaksesuaian informasi yang disampaikan. *Cross-check* data dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat atau pihak-pihak yang dipandang memahami kondisi warga. Selain memperhatikan data yang bersumber dari masyarakat, prosedur Regsosek untuk memperhatikan data yang dikumpulkan PPL, yaitu harus tepat dan objektif sesuai kondisi warga. PPL memastikan data yang dikumpulkan dengan membandingkan jawaban warga dengan pengamatan lapangan. Apabila PPL tidak datang langsung menemui warga dan hanya melakukan *tagging*, data yang terkumpul dapat diperiksa oleh PML sebagai bentuk mekanisme kontrol. PML yang notabenehnya merupakan warga wilayah tersebut dapat melakukan *cross-check* informasi baik melalui warga langsung ataupun kenalan warga yang dikenal PML. Kemudian, untuk validasi data, PPL dan PML dapat bekerja sama untuk *cross-check* data jika dirasa ada informasi yang tidak tepat.

Data yang dikumpulkan PPL akan diperiksa PML dan juga di cek kembali oleh Koseka. Hasil himpunan data akan di input pada *dashboard* yang terpantau oleh ketua tim pendataan lapang. Apabila ada anomali data atau terpantau lambat pergerakannya, ketua tim pendataan lapang akan berkomunikasi langsung dengan Koseka dan PML. Terlepas dari struktur yang ada, setiap pihak memanfaatkan platform digital untuk saling berbagi pesan dan berkoordinasi. Terdapat berbagai macam pemanfaatan aplikasi dan media digital,

seperti Wilkerstat dan web untuk memantau pelaksanaan Regsosek. PPL, PML, Koseka, dan PJK juga menggunakan platform digital untuk saling bertukar informasi, bertanya, dan menyampaikan kendala yang dialami. Komunikasi yang terbangun cukup intensif dan mendukung kelancaran pendataan.

G. Life Story Pendata

Bapak Munardi atau yang lebih akrab disapa Pak Uun sudah aktif terlibat dalam kegiatan sensus selama 22 tahun, sejak tahun 2000. Bagi beliau, mendukung kegiatan pendataan warga sejalan dengan minatnya, terkhusus keinginan kuatnya untuk menyampaikan data masyarakat yang dipandang mampu mendorong perubahan. Bapak Uun lahir di Kabupaten Indramayu dari keluarga yang kesehariannya bersandar pada pertanian. Beliau turut terlibat dalam berladang dan mengelola sawah. Beliau merupakan salah satu dari empat warga desa yang menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA) pada masanya. Bapak Uun menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat di desanya menempuh pendidikan pada tingkat SD dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Berbagai faktor memengaruhi kondisi tersebut, yaitu kondisi ekonomi dan perspektif yang memandang pendidikan bukan hal yang penting. Bapak Uun memiliki pandangan dan tekad untuk menyelesaikan pendidikannya. Selepas menamatkan pendidikan, Bapak Uun sempat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan. Saat kembali ke Indonesia, Bapak Uun mulai menata kegiatannya dan bekerja di Indramayu. Sembari bekerja, Bapak Uun mendapat tawaran untuk membantu kegiatan sensus.

Pengalaman mendata menarik beliau pada kegiatan sensus selanjutnya. Beliau meningkatkan kapasitasnya untuk memahami proses “mendata” bertemu dengan berbagai pihak, baik pemerintah lokal dan masyarakat desa. Sejalan dengan peningkatan kapasitas, jejaring perkenalan beliau juga meluas. Pemerintah desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten mengenal beliau sebagai salah satu penggerak

dalam masyarakat. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada Bapak Uun terbangun dengan baik. Beliau disebutkan sebagai seorang yang disiplin, pekerja keras, dan kawan belajar. Beliau berupaya untuk mendorong pendata agar menghasilkan data sesuai standar dan tepat waktu. Disisi lain beliau mampu merangkul rekan-rekan yang baru beradaptasi dan membutuhkan bantuan dalam proses mendata. Bagi Bapak Uun, tugas yang menantang terkait kerja tim ialah mendorong petugas pendata untuk disiplin menyelesaikan tugas. Pada akhirnya, beliau mengapresiasi hasil kerja rekan-rekannya.

Dalam proses Regsosek, Bapak Uun mengikuti tahap dan prosedur pemilihan petugas pemeriksaan lapangan (PML). Beliau terpilih menjadi salah satu PML di Kabupaten Indramayu dan bertanggung jawab atas empat petugas pendataan lapangan (PPL). Tugas utama beliau adalah mengoordinasi jalannya pendataan, memeriksa hasil pendataan PPL, dan memastikan validitas data lapangan kepada Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Beliau juga turut turun lapang dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi PPL saat mendata. Beliau membantu rekan PPL yang kesulitan menghadapi warga apabila ada penolakan.

“Saya datang ke warga yang menolak tanda tangan *form*. Pas dia lihat wajah saya, dia senyum, langsung tanda tangan. Ternyata dia kenal saya. Saya diminta masuk rumah dan kita banyak cerita, Regsosek ini juga. Pokoknya kalau ada warga yang sulit ditemui PPL, saya kunjungi. Alhamdulillah warga disini, saya banyak kenal.” (Wawancara dengan Bapak Uun, 8 November 2022)

Beberapa warga menyatakan keberatan untuk didata dan tidak bersedia tanda tangan pada *form* kuesioner, bahkan menolak kehadiran PPL. Apabila keadaannya menjadi sulit, PPL menghubungi Bapak Uun. Bapak Uun akan langsung mengunjungi rumah warga dan menjelaskan kepentingan Regsosek. Kehadiran Bapak Uun mampu meredakan penolakan warga. Seluruh pengalaman seperti ini dapat

diselesaikan Bapak Uun secara kekeluargaan. Warga yang dikunjungi Bapak Uun pun ternyata mengenal Bapak Uun. Pada akhirnya, warga yang menolak bersedia mengenal Regsosek.

Bapak Uun sebagai PML tidak hanya memiliki kapasitas sebagai seorang petugas pendata. Beliau memiliki pengaruh, mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan jeli terhadap karakter masyarakat. Beliau mampu mengomunikasikan kepentingan Regsosek dalam bahasa yang dimengerti masyarakat. Pengalaman Bapak Uun dalam Regsosek tahun ini disebut beliau penuh tantangan dan hal baru. Beliau menyebutkan substansi pertanyaan kuesioner sebagai salah satu faktor yang menyebabkan beberapa responden menolak memberitahukan informasinya. Ada pula warga yang tidak memberikan informasi yang sebenarnya, bahkan ada warga yang mendorong warga lainnya untuk menyembunyikan aset yang dimiliki seperti TV dan motor agar tidak diketahui petugas pendata. Dalam mengatasi hal ini, petugas PML dan PPL perlu cermat menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Untuk memastikan validitas data, PPL melakukan *cross check* dengan warga yang mengenal responden. Di sisi lain, petugas PML dan PPL merupakan warga setempat sehingga sudah memahami latar belakang responden untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Sebagai contoh, pertanyaan terkait kepemilikan motor, PPL mengetahui kondisi kepemilikan motor karena mengenal keseharian responden sehingga walaupun motor disembunyikan warga, petugas tetap mengetahui situasi yang sebenarnya.

Pertanyaan kuesioner yang sulit untuk dijawab adalah terkait pekerjaan dan aset. Mayoritas warga bekerja sebagai petani sehingga saat musim tanam selesai, petani tidak melakukan kegiatan apapun. "Pekerjaan serabutan" menjadi jawaban yang membingungkan PPL karena tidak sesuai dengan pilihan jawaban kuesioner. Bapak Uun sebagai PML memastikan pekerjaan responden sesuai dengan jawaban yang disediakan dalam kuesioner. Bapak Uun turut mencari informasi dan memeriksa kembali data jenis pekerjaan serta membantu PPL untuk menentukan jenis pekerjaan dalam isian kuesioner. Beliau

mengharapkan isian data PPL sesuai dengan ketentuan, tetapi saat di lapangan banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai sehingga PPL kesulitan mengisi beberapa data.

Pertanyaan mengenai aset seperti emas dan sawah menjadi contoh yang sering terjadi dimana masyarakat tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Faktor utamanya karena warga tidak mengingat jumlah gram emas yang dimilikinya dan faktor lainnya karena warga menganggap informasi tersebut sebagai hal privat. Hal ini perlu menjadi perhatian, bahwa penggalian informasi mengenai aset warga perlu dilakukan secara hati-hati. Kemudian, pada pertanyaan mengenai luasan sawah, ada beberapa warga yang enggan memberikan informasi. Bapak Uun menanggapi hal tersebut dengan memberikan pernyataan, “Datanya bisa digunakan kalau ada pembagian pupuk nanti.” Responden kemudian bersedia menyatakan jumlah lahannya. Bapak Uun juga memberikan pemahaman kepada warga bahwa pendataan Regsosek bukan untuk memberikan bantuan, tetapi sebagai data dasar yang dapat menjadi rujukan berbagai pihak untuk memberikan intervensi program. Pak Uun sebagai PML mengatasi berbagai pertanyaan dan penolakan warga dengan tenang.

PML memiliki peran untuk memastikan jawaban kuesioner sesuai dengan kondisi responden. Bapak Uun membangun komunikasi reguler dan aktif dengan PPL, Koseka, dan PJ kecamatan untuk memastikan isian kuesioner tidak hanya terjawab, tetapi memiliki kualitas dan validitas yang tepat. Bapak Uun menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul bagi sesama rekan PML dan PPL untuk saling menginformasikan capaian pekerjaan hingga tempat berbagi cerita. Bapak Uun, rekan PML dan PPL berkumpul hampir setiap malam untuk saling memeriksa hasil pendataan. Beliau menyediakan teh hangat, kopi, dan gorengan sebagai bentuk kedekatan dalam menyelesaikan tugas bersama.

Tantangan yang dihadapi Bapak Uun selain terkait substansi pertanyaan ialah cara pandang masyarakat bahwa dalam pendataan pasti akan ada “pemberian bantuan”. Pemikiran inilah yang turut memengaruhi penerimaan warga atas kedatangan PPL. Kekhawatiran

masyarakat apabila menyebutkan jumlah aset maka tidak akan mendapat bantuan pemerintah. Istilah “*bestie*” muncul di desa untuk mewakili fenomena dimana orang terdekat dari pihak tertentu saja yang menerima bantuan. Adanya kecurigaan masyarakat dalam pemberian bantuan sebelumnya memengaruhi cara pandang warga terhadap Regsosek. Warga setempat pernah merasa mengalami ketidakadilan pembagian bantuan sehingga kegiatan pendataan yang tidak memberi manfaat bagi warga, hanya dipandang sekadar memperlmainkan warga. PML dan PPL memaklumi situasi ini, selama warga bersedia bekerja sama pada pendataan. PML dan PPL tetap berupaya menyampaikan tujuan Regsosek dan membangun pemahaman mengenai pentingnya data.

PML dan PPL mendapatkan surat tugas, *nametag*, tas, dan insentif untuk menunjang kinerja di lapang. Bagi petugas yang sudah sering terlibat pendataan, petugas tidak terlalu sulit untuk memahami konsep dan prosedur Regsosek. Namun, bagi petugas baru, petugas mengaku bahwa membutuhkan waktu lebih dan pendampingan langsung untuk memahami dan mempelajari alur dan proses bisnis Regsosek. Setelah mengikuti pelatihan, PML dan PPL membangun komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Regsosek dengan penanggung jawab kabupaten (BPS Indramayu), penanggung jawab kecamatan, dan koordinator sensus kecamatan (Koseka). Koordinasi dan komunikasi sangat terbantu dengan menggunakan platform/media digital. Pada setiap pelaksana kegiatan, terdapat grup platform digital untuk saling berkomunikasi, memantau perkembangan, dan berbagai informasi.

Pelaksanaan Regsosek dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) secara *door to door*. Kegiatan ini sekaligus membantu untuk verifikasi keluarga baru dan rumah baru. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam 1 (satu) bangunan rumah dapat diisi oleh 2 (dua) keluarga atau lebih. Petugas pendataan perlu menyesuaikan pendataan pada tiap keluarga. Sebelum mendata *door to door*, petugas berkomunikasi dengan RT untuk mengidentifikasi awal informasi keterangan miskin dan tidak miskin pada warga. Informasi ini hanya berfungsi sebagai latar belakang dan tidak dijadikan sebagai

acuan data. Penyertaan RT dipandang diperlukan untuk memberi dukungan proses pendataan Regsosek dan membantu mediasi apabila terjadi konflik antara petugas dan warga. Pelaksanaan Regsosek yang membuat petugas kesulitan ialah adanya permintaan foto (atap, lantai, dinding, dan toilet) warga. Petugas mendapatkan permintaan ini saat sudah setengah perjalanan proses Regsosek. Petugas dan bersama penanggung jawab kabupaten dan tim memutuskan apakah mengulangi dari awal untuk melengkapi foto atau tetap melanjutkan pendataan dengan tambahan permintaan tersebut. Keputusan yang diambil ialah tetap melanjutkan pendataan dan tidak kembali untuk melengkapi data sebelumnya. Hal ini dipilih dengan mempertimbangkan waktu Regsosek dan target untuk menyelesaikan pendataan.

Bapak Uun memperhatikan pentingnya indikator kemiskinan yang digunakan di desa. Beliau memikirkan penentuan kategori miskin dan perlu meninjau aspek basis data dan situasi lapangan. Kemudian, pernyataan batasan miskin dipandang bias jika diterapkan langsung tanpa melihat kondisi yang sebenarnya secara mendalam. Sebagai contoh, ada warga yang memiliki rumah dengan kondisinya baik tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, ada warga yang tidak memiliki aset tetapi mendapat kiriman biaya dari keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Kedua contoh tersebut memperlihatkan adanya *gap* mengenai situasi lapangan dan pertanyaan kuesioner. Kejadian ini mengangkat pentingnya mengakomodasi situasi lapangan dalam pendataan selanjutnya.

Aspirasi Bapak Uun terkait pelaksanaan Regsosek ialah basis data digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian, terkait pelaksanaan Regsosek ialah peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yaitu petugas pendata. Terkait SDM, satu PPL mendapatkan tugas tanya jawab dengan responden untuk mengisi kuesioner, tugas melakukan *tag* rumah, dan apabila pendataan di rumah warga yang masuk kategori miskin, tugas foto menjadi wajib

dilakukan. Bapak Uun mengungkapkan apabila terdapat dua PPL untuk satu rumah tangga, maka akan meningkatkan efektifitas pekerjaan. Bapak Uun juga menyuarakan pentingnya penambahan durasi pelatihan terkhusus studi kasus atau praktik lapangan yang memperluas pemahaman masyarakat terhadap situasi sosial dan budaya masyarakat.

Lesson learnt kegiatan mendata cukup mendalam bagi Bapak Uun. Beliau menyebutkan bahwa kapasitas pribadi benar-benar diuji. Beliau yang awalnya gugup berbicara, belajar menguasainya, membangun komunikasi interaktif, belajar menyuarakan kepentingan masyarakat, dan beliau menjadi dikenal banyak orang. Pengalaman mendata inilah yang membawa beliau pada kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Pernyataan masyarakat lokal, “Orang yang terlibat sensus, akan dipakai masyarakat.” Maksudnya, orang-orang yang memiliki pengalaman pendataan mendapat kepercayaan untuk mengemban tugas pemerintahan. Bapak Uun pun sebelumnya pernah menjabat sebagai sekretaris desa pada tahun 2007. Hal ini juga terjadi pada rekan-rekan petugas pendata yang dipercayakan masyarakat dan pemerintah lokal.

Selain Bapak Uun, perjalanan Regsosek menarik lainnya diceritakan Mbak Dewi. Mbak Dewi merupakan salah satu PPL berlatar belakang pendidikan sarjana bahasa (S-1) yang mendapat tugas di Desa Juntikedokan. Mbak Dewi mendapat tugas untuk mendata 2 Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sejumlah 138 KK pada SLS pertama dan 124 KK pada SLS kedua. Mbak Dewi mengakui membutuhkan waktu lima hari untuk benar-benar fasih mengutarakan pertanyaan kuesioner. Awal pengenalan Mbak Dewi dengan kegiatan pendataan ialah saat beliau menjadi salah satu responden. Beliau menggali lebih dalam mengenai pendataan kepada petugas. Pemahaman yang beliau dapatkan mendorong beliau untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pendataan selanjutnya. Beliau memberanikan diri untuk bertanya mengenai peluang untuk menjadi petugas pendata kepada salah seorang rekan yang kemudian menjadi

PML. Beliau mengikuti seleksi petugas pendata lapangan dan diterima untuk turut terlibat dalam Regsosek.

Motivasi yang mendorong Mbak Dewi untuk mengikuti seleksi petugas pendata ialah keinginannya untuk belajar dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Suami dan anak beliau merantau ke Taiwan untuk bekerja sebagai PMI sehingga beliau merasa mengisi waktu sebagai petugas pendata merupakan pengalaman positif. Mbak Dewi menyadari betul bahwa Regsosek adalah pengalaman pertama beliau sehingga berbagai persiapan termasuk memahami strategi untuk bertanya dan mengisi data sangat penting untuk dikuasai. Mbak Dewi mengutarakan pertanyaan yang mudah dipahami warga dan tidak secara langsung menyinggung informasi yang dianggap sensitif bagi warga. Beliau menggunakan pertanyaan sederhana dengan memperhatikan situasi emosi respondennya. Beliau berbincang lebih dahulu untuk membangun keakraban. Kemudian mengutarakan pertanyaan mengenai aset, seperti “Sapi ibu ada sepuluh ya, Bu?” dengan intonasi ramah. Beliau pun merasa banyak diterima oleh responden bahkan beberapa warga datang ke rumah beliau untuk bertanya apakah sudah terdata atau belum. Responden beliau juga memberikan mangga, biskuit, dan semangka. Utamanya adalah ibu-ibu yang ada di desa. Terlepas dari berbagi makanan, Mbak Dewi mengakui bahwa beliau mendapatkan banyak kenalan dan membangun pertemanan dengan warga desa. Hal ini memudahkan untuk memberikan pemahaman mengenai Regsosek.

Secara personal, beliau mengungkapkan kesempatan sebagai petugas Regsosek memperluas pemahaman beliau terkait pembangunan berbasis data. Mbak Dewi berlatih untuk menyampaikan maksud dan tujuan Regsosek kepada warga walaupun ada beberapa warga yang merasa keterangan tersebut bukan hal penting. Sebagai PPL, beliau berkomunikasi langsung dengan PML apabila ada kendala di lapangan. Beberapa kendala yang beliau alami: 1) kesulitan sinyal saat proses tag rumah responden (lokasi tag dapat bergeser hingga 30 m dan mengalami *lag*, 2) aplikasi yang digunakan terkadang tidak dapat diakses atau lambat, 3) kesulitan mengisi data responden, 4) warga

yang tidak dapat ditemui, dan 5) kondisi hujan yang menghambat akses jalan. PML akan membantu dan menyelesaikannya apabila masih kesulitan, PML akan berkomunikasi dengan Koseka. Grup platform media *chat* adalah wadah yang mempermudah komunikasi dan berbagi pengalaman dalam menyelesaikan masalah di lapangan.

Mbak Dewi juga mengungkapkan pentingnya *power bank* untuk menunjang pekerjaan dan berharap ukuran *font* tulisan kuesioner dapat lebih besar karena mempengaruhi kecepatan kerja. Pengalaman Bapak Uun dan Mbak Dewi menggambarkan bagaimana rekan-rekan petugas pendata mengerahkan kemampuan terbaik yang dapat dilakukan. Petugas pendataan menyadari terkadang lambat pada masa awal pendataan, tetapi kemudian meningkatkan performa kinerja dengan saling berbagi strategi dengan PML, Koseka, PJK, dan Ketua Tim Pendataan. Berbagai tantangan ini dapat diselesaikan bersama. PML dan PPL terbuka untuk meningkatkan kemampuannya. Kesempatan pendataan memberikan pengalaman, pembelajaran, dan memperluas jejaring persahabatan dengan masyarakat.

H. Life Story Keluarga Pekerja Migran Indonesia: Mengetahui Data, Melindungi Diri

Pilihan migrasi sebagai pekerja migran di luar negeri mengisahkan bagaimana pekerja migran menjadi ringkih jiwanya, di atas identitas kewarganegaraan dan perasaan sebagai bagian negara. Pekerja migran melihat tidak akan ada perubahan dengan kondisinya jika tetap di desa. Di sisi lain, negara lain memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Pekerja migran mendapatkan perspektif baru dalam memaknai ke-Indonesiaannya saat berada di negeri yang berbeda. Berbagai tantangan yang dirasakan pekerja migran, diantaranya beradaptasi dengan lingkungan baru, membangun pertemanan dan ikatan sosial, kerelaan untuk terpisah dari keluarga, dan usaha untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga di desa. Berbagai alasan ekonomi dan sosial juga mendorong warga mencari pekerjaan hingga ke negeri seberang.

Konstruksi kesejahteraan yang terbangun oleh masyarakat umumnya diorientasikan pada tampilan rumah yang besar, kepemilikan motor dan barang elektronik diatas kebutuhan keseharian, biaya pendidikan, serta keguyuban dan kesatuan. Masyarakat menilai kepemilikan rumah dan barang-barang lainnya sebagai bentuk keberhasilan. Dibalik penilaian ini, ada motivasi tentang pengakuan diri. Sejalan dengan argumentasi Fukuyama (1992) yang menerangkan pemikiran Hegel bahwa penggerak sejarah manusia didasarkan pada perjuangan untuk diakui. Motif pengakuan dipandang sebagai pendorong utama disamping motif materialistik. Masyarakat menentukan definisi keberhasilan, bekerja di luar negeri, dan membangun rumah merupakan standar untuk diakui sebagai warga yang berhasil.

Kemampuan untuk mengonstruksi kesejahteraan, selain dalam bentuk materi menjadi perhatian PML dan pemerintah Desa Dadap. PML mengungkapkan bahwa masih banyak warga yang menjadi korban penipuan agen-agen pengirim PMI yang tidak resmi, bahkan terbawa hingga ke ranah hukum. PML di Desa Dadap berupaya membantu warga untuk dapat melindungi diri, tidak mudah percaya dan tidak memberikan data pribadi kepada agen-agen yang baru dikenal. Salah satu PML di Desa Dadap, membangun jejaring informasi dan aktif menyuarakan pentingnya menjaga data pribadi warga serta melakukan dialog-dialog edukatif terkait isu PMI, pemberdayaan nelayan, dan pembangunan desa. Realitanya, memang belum seluruh warga menjadikan isu tersebut sebagai perhatian bersama. PML mengakui, penerimaan terhadap nilai-nilai baru umumnya diterima oleh kelompok pemuda yang ada di desa.

Mbak Lia mewakili keluarga yang memiliki visi yang sama terkait *melek data* untuk menjaga warga dari berbagai penipuan. Keluarga dengan latar belakang usia muda yaitu 33 tahun melalui waktu dengan pengalaman menjadi PMI selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. Mbak Lia berangkat ke Taiwan untuk bekerja dan setelah selesai kontrak sekitar 2 (dua) tahun beliau kembali ke Indonesia, menjalani kehidupan sebagai warga desa dan menikah. Kemudian,

Mbak Lia berangkat untuk kedua kalinya sebagai PMI ke Taiwan. Ada perbedaan pada keberangkatannya yang kedua dengan keberangkatan pertama. Beliau membayar belasan juta kepada agen dan dipotong gaji selama 9 (sembilan) bulan yaitu 50% untuk keberangkatan pertama. Saat keberangkatan kedua, Mbak Lia memberanikan diri untuk berangkat tanpa melalui agen di Indramayu, tetapi langsung kepada agen pertama di Jakarta dan pemotongan gaji beliau hanya selama 6 (enam) bulan. Suami beliau juga menyusul sebagai PMI dan bekerja di pabrik industri di lokasi yang berjarak sekitar dua jam perjalanan dari lokasi Mbak Lia bekerja.

Kondisi rumah dengan anggota keluarga yang bekerja di luar negeri juga menjadi tantangan bagi PPL. Dalam 1 keluarga, terdapat anggota yang bekerja di luar negeri ataupun sepasang suami-istri sama-sama tidak ada di rumah. Hanya ada orang tua dari PMI yang menjaga cucunya atau saudara yang menjaga keponakannya. Kemudian, jawaban mengenai aset dan penghasilan terkadang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, seperti data aset. Mantan PMI memiliki rumah dengan kondisi layak, bahkan mewah. Namun, tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak mampu menyekolahkan anak, dan membangun usaha.

Mbak Lia mengungkapkan prioritas penghasilan keluarganya memang ditujukan untuk perbaikan rumah. Setelah beberapa tahun bekerja sebagai PMI, keluarga ini pun mulai memikirkan bahwa penghasilan yang didapatkan tidak dapat dihabiskan hanya untuk rumah. Keluarga ini menyadari pentingnya mengumpulkan modal usaha dan tabungan pendidikan anak. Keluarga ini memutuskan untuk merintis usaha bengkel jika memiliki modal yang cukup sembari aktif pada platform jual-beli *online*.

Kondisi lingkungan sosial meyakini bahwa memiliki penghasilan dalam jumlah besar adalah salah satu pencapaian hidup. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan menjadi alasan keluarga ini mencoba bekerja sebagai PMI. "Ingin kerja, disini pekerjaan susah ya. Jadi, tertarik sama teman-teman yang sudah berangkat kerja ke luar," ungkap Mbak Lia. Pilihan menjadi PMI pun bukan tanpa pengorbanan dan

risiko. Warga perlu membayar kepada sponsor/agen untuk jaminan dan setelah bekerja pun potongan penghasilan diberlakukan sebagai imbal jasa. “Kalau dulu *mah* gampang ya, bayar 4 juta bisa. Kalau sekarang ada yang 14-15 juta rupiah,” terang beliau. Banyak pula kasus keluarga PMI yang memberikan surat tanah sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa saat sudah selesai membayar jasa, maka surat tanah tersebut dikembalikan. Namun, pada kenyataannya masih ada warga yang tidak mendapatkan kembali surat tanahnya.

Keluarga Mbak Lia adalah salah satu keluarga di Desa yang menjadi PMI. Mayoritas warga yang ditemui PPL merupakan keluarga-keluarga PMI dan termasuk petugas pendata sendiri (PPL dan PML) pun banyak yang memiliki pengalaman sebagai PMI. Dengan kesamaan tersebut, pendata dan responden membuka pembicaraan terkait pengalaman bekerja di luar negeri. Keluarga Mbak Lia sering dijadikan *sample* pendataan karena kemampuannya dan keterbukaannya untuk menjawab pertanyaan sehingga pendataan Regsosek kali ini dihadapi dengan santai. Saat ditanya mengapa ia begitu santai dan terbuka menjawab pertanyaan, Mbak Lia menerangkan bahwa beliau memahami pendataan merupakan kegiatan resmi pemerintah dan data yang disampaikan kepada petugas juga turut membantu pemerintah. Bagi keluarga seperti Mbak Lia, ia tidak memiliki prasangka negatif ataupun terlalu memedulikan pernyataan orang jika ada yang mengatakan pendataan sebagai kegiatan yang tidak penting, sia-sia, atau stigma buruk lain. Mbak Lia memandang kehadiran PPL sangat membantu keluarganya memahami data dan hubungan data dengan berbagai aspek kehidupannya. Pada awalnya, keluarga ini menganggap pendataan sebagai hal wajar yang dilakukan pemerintah dan tidak memahami detail perbedaan pendataan. Rekan PML memberi penjelasan terkait perbedaan satu data dengan data lainnya dan pemanfaatan data hingga pentingnya menjaga data.

Bagi keluarga beliau, mengungkapkan informasi dan situasi keluarganya untuk pendataan adalah bentuk penerimaan beliau terhadap kegiatan Regsosek. Beliau tidak ragu menyebutkan informasi yang dibutuhkan. Beliau awalnya tidak memahami tujuan dari

setiap pertanyaan, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari rekan PPL dan PML, beliau memahami bahwa data yang dikumpulkan penting dan terkait dengan kebutuhan hidup orang banyak. Beliau mengakui bahwa salah seorang PML, Mas Eko merupakan kawan yang mendorong tumbuhnya pemikiran-pemikiran kepedulian terhadap desa dan masyarakat. PML yang memiliki peran sebagai penggerak masyarakat memberikan pengaruh signifikan dalam proses pendataan Regsosek di lapangan. PML bercerita mengenai bagaimana faktor eksternal dan internal mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik baik PMI, petani dan nelayan di tengah ketidakpastian cuaca dan rendahnya dukungan kelembagaan sosial serta konflik laten yang menciptakan jarak antara masyarakat dengan peluang perbaikan kesejahteraannya.

Bagi keluarga Mbak Lia, Mas Eko berperan besar dalam memperluas pandangan keluarga ini tentang data, bagaimana menjaga data dan kritis terhadap pendataan. Mbak Lia menjadi lebih mawas terhadap data penting dan turut menjaga lingkungannya dari penipuan ataupun agen yang menawarkan pekerjaan tidak jelas status legalnya. Mas Eko melakukan upaya-upaya untuk turut memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga data KTP, KK, dan surat aset-aset berharga. “Untungnya kita dapat teman yang kasih pengaruh baik,” ungkap Mbak Lia sembari melihat rekan PML. Interaksi Mbak Lia dengan rekan-rekan petugas pendataan merupakan lingkaran pertemanan sehingga beliau lebih mudah untuk bertanya dan memberikan saran. Mbak Lia berharap data yang sudah dikumpulkan dapat diakses pemerintah desa dan daerah serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang tepat sasaran.

I. Mengikat Tugas Individu dalam Kepentingan Negara

Kegiatan Regsosek secara tidak langsung menjadi ruang untuk membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan Negara. Para pihak pengampu

tanggung jawab pendataan baik dari sisi struktur dan kultur mengupayakan pelaksanaan Regsosek secara akuntabel, inklusif, dan kolaboratif. Di sisi struktur, terdapat BPS RI, BPS Provinsi, BPS Kabupaten Indramayu, sedangkan di sisi kelembagaan sosial, terdapat pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan perwakilan masyarakat yang mengambil peran sebagai petugas pendataan. Badan Pusat Statistik RI melakukan persiapan baik dari sisi substansi, manajemen, dan teknis. Beberapa panduan dan prosedur serta manajemen kontrol disiapkan untuk pelaksanaan Regsosek. Staf BPS Pusat mengungkapkan beberapa hal yang menjadi perhatian saat pelaksanaan kegiatan: 1) manajemen lapangan, 2) menyediakan prosedur generik untuk seluruh kawasan Indonesia, dan 3) penyimpanan data agar tetap *confidential*. Tentunya berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan proses Regsosek. Pada tingkat pemerintah pusat, Regsosek merupakan kegiatan pendataan mewakili jejaring lintas kementerian/lembaga. Pada tingkat daerah, kepentingan pendataan diharapkan menjadi basis data para pemangku kepentingan dalam melaksanakan intervensi kebijakan. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pihak dalam mendesain dan memperhatikan pendekatan (*engagement*) untuk membangun kesamaan tujuan dan semangat Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia menjadi frasa yang dapat mengikat kesadaran para pihak dalam mewujudkan perubahan positif dan berkontribusi dalam pembangunan. Penekanan makna kesatuan dan gotong royong membuka kesempatan bagi para pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk aktif berpartisipasi mendukung perbaikan pendataan. Namun, pada prosesnya dibutuhkan usaha untuk menyamakan pemahaman dan kolaborasi para pihak. Semangat kooperatif di daerah tecermin dari BPS Indramayu, petugas pendata, dan penggerak-penggerak lokal yang berpartisipasi dalam kegiatan Regsosek. Secara garis besar, potret pelaksanaan Regsosek di Indramayu mendapati pemangku kepentingan di tingkat daerah melalui BPS Kabupaten dan petugas pendata mengerahkan sumber daya manusia dengan prinsip kerja

tim. Pemimpin BPS Kabupaten, Penanggung Jawab Kabupaten dan Kecamatan, tim IT, tim administrasi, petugas pendata, mitra, dan pihak lainnya memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan dan kontrol kualitas kegiatan menjadi kunci pelaksanaan Regsosek. Para pihak yang terlibat umumnya meluangkan waktu dan tenaga di luar hari kerja.

Memaknai bagaimana individu melaksanakan tugasnya berarti pula berupaya menemukan motivasi dan menelusuri ruang sadar para pihak. “Mengikat tugas individu dalam kepentingan Negara” bagi Penanggung Jawab Kabupaten berarti komitmen mendukung tim mencapai tujuan, menyelaraskan gerak setiap pihak, dan terlibat langsung dalam mengatasi masalah. Bagi Penanggung Jawab Kecamatan, “Mengikat tugas individu dalam kepentingan Negara” berarti kesediaan untuk selalu bersama dan turut membantu PML dan PPL melaksanakan perannya.

Bagi petugas pendataan, “Mengikat tugas individu dalam kepentingan negara” sesederhana ketulusan mendengarkan cerita responden, mendengar suara warga negara, yang berarti juga menuangkan realitas kehidupan warga ke dalam data. Petugas mengungkapkan tidak sedikit masyarakat yang bercerita mengenai kehidupannya, keluh kesah, dan harapannya. PML dan PPL dibekali pemahaman bahwa Regsosek adalah pekerjaan penting terkait isu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip kebenaran dan menjunjung objektivitas. Kepentingan pendataan juga dipahami sebagai kegiatan merekam kondisi masyarakat yang sebenarnya. Petugas pendata memaknai tugasnya sebagai kesediaan untuk berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat. PML dan PPL menyadari pengalaman pendataan membantu PPL menjadi berkembang pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilainya selama proses Regsosek terutama membangun kepedulian terhadap sekelilingnya.

J. Penutup

Sejatinya, Regsosek menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk mencapai target pendataan. Regsosek dan kegiatan pendataan-pendataan lainnya ada dalam ruang pikir, ruang personal, dan ruang sosial budaya masyarakat. Proses pendataan selama ini terekam dalam kesadaran masyarakat, menjadi dasar pemahaman masyarakat atas pendataan. Ada rupa lain (dibaca: pengaruh) yang dibawa dalam kegiatan pendataan. Hal ini penting untuk ditangkap pemangku kepentingan bahwa pendataan dapat dikuatkan sebagai upaya berbagi pemahaman dan edukasi. Pendataan selayaknya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut memahami data dalam bahasa yang sederhana, memahami hubungan data dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, membangun kepekaan, dan kritis terhadap situasi sekelilingnya.

Proses pendataan di lapangan memiliki dampak beruntun terhadap bagaimana masyarakat memahami data, terlebih apabila proses pendataan menjadi ruang penyadaran untuk melindungi data pribadi yang berarti pula melindungi diri. Dalam konteks situasi sosial di Indramayu, isu penipuan pekerja migran dan penipuan atas nama petugas sensus telah dialami warga desa. *Melek data* yang berarti pula *melek informasi* dapat membantu menguatkan masyarakat desa untuk mampu melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan.

Pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Indramayu telah dilaksanakan dalam kerangka manajemen kualitas PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), tergambar dari alur kerja dan komunikasi BPS Indramayu hingga pelaksana pendataan lapangan. Strategi manajemen Regsosek di Kabupaten Indramayu berupaya memadukan unsur struktur dan kelembagaan sosial, tetapi tidak dapat dipungkiri kelembagaan sosial belum optimal terlibat dalam Regsosek. Secara umum, para pihak mulai dari Kepala BPS Indramayu, Tim IT, Tim Administrasi, Ketua Tim Pendataan Lapang, PJ Kecamatan (PJK), Koseka, PML, dan PPL

mengerahkan kemampuannya untuk mencapai target pelaksanaan Regsosek yang berkejaran dengan waktu.

“Kerja tim” menjadi kata yang menggambarkan bagaimana Regsosek menyatukan pemerintah, pendata dan masyarakat dalam misi yang sama. Menariknya, motivasi para pihak didasari oleh nilai yang serupa: kepedulian, kesetaraan, perubahan, dan integritas. Para PPL, PML, Koseka, dan PJK (Penanggung Jawab Kecamatan) duduk bersama mencari solusi tanpa membuat masalah berlarut-larut. PML dan PPL pun bukan hanya petugas pendata formal, melainkan juga bagian masyarakat yang memiliki pengaruh dan tidak sedikit yang merupakan penggerak masyarakat.

Beberapa catatan sebagai hasil dari saling belajar dan berbagi pengalaman dengan rekan BPS Indramayu dan masyarakat, tetap layak diperhatikan dalam pendataan selanjutnya, yaitu: 1) sosialisasi dan edukasi terkait data dan urgensinya dalam aspek kehidupan masyarakat, 2) dukungan SDM pelaksana hingga tingkat lokal dan sistem manajemen pelaksana, 3) memadukan unsur struktur dan kultur secara fleksibel, 4) *confidential* data dan perangkat digital yang menyertainya, 5) terbuka atas situasi lapangan yang terkadang belum tentu terakomodir dalam prosedur, dan 6) mitigasi risiko apabila proses pendataan masih melewatkan warga dan mekanisme Forum Konsultasi Publik (FKP). Berbagai tantangan dan kendala yang dialami selama Regsosek sepatutnya menjadi dasar perbaikan untuk pendataan selanjutnya. Terlebih, apabila pemangku kepentingan dapat menghasilkan inovasi dalam mengatasi kendala pendataan sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Tindak lanjut dari perbaikan siklus perencanaan-mitigasi perlu menjadi pembelajaran sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Daftar Pustaka

- BPS. (2022). *Jawa Barat dalam angka*. BPS Provinsi Jawa Barat.
BNP2TKI. (2019). *Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia 2019*. BNP2TKI

- BP2MI. (2022). Data pekerja migran Indonesia periode tahun 2021. BP2MI. Diakses pada 20 November, 2022, dari <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-tahun-2021>
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. Avon Books
- Guerrero, M., & Urbano, D. (2020). Institutional conditions and social innovations in emerging economies: Insights from Mexican enterprises' initiatives for protecting/preventing the effect of violent events. *J Technol Transf*, 45, 929–957
- Google. (t.t.) [Lokasi Kabupaten Indramayu]. Diakses pada 7 November 2022, dari <https://www.google.com/maps/place/Indramayu>
- Messner, S. F., Rosenfeld, R., & Karstedt, S. (2013). Social institutions and crime. Dalam Cullen, F. T., & Wilcox, P. (Eds.), *The Oxford handbook of criminological theory* (405–423). Oxford University Press.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi: Suatu pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tukiran, T., Sukamdi, S., & Effendi, S. (1989). *Pelaksanaan registrasi penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.